

Perilaku Memilih Pemuda Tionghoa pada Pilkada Kota Palembang Tahun 2018

Khairunnas,¹ Leo Agustino,² Widya Setiabudi Sumadinata³

¹Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, ²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

¹Corresponding author: khairunnas_han@yahoo.com

ABSTRAK

Munculnya isu demografi membuat penelitian terkait perilaku pemilih pemula sangat menarik untuk dilakukan, beberapa penelitian berhasil menemukan kecenderungan perilaku pemilih pemula, dan beberapa penelitian lainnya juga berhasil menemukan kecenderungan perilaku memilih yang dilatarbelakangi identitas etnis. Oleh sebab itu peneliti tertarik membahas dan menguraikan kecenderungan perilaku pemilih dalam kategori usia tertentu yang juga dibenturkan dengan faktor etnisitas. Etnis Tionghoa merupakan etnis minoritas yang memiliki sejarah panjang di panggung politik Indonesia, dan Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang banyak meninggalkan bukti sejarah peradaban Tionghoa, bahkan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan perilaku memilih Pemuda Etnis Tionghoa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan rancangan survei. Unit analisis penelitian ini adalah pemuda Etnis Tionghoa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan perilaku pemilih dengan analisis tiga Model, yakni Model sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih Pemuda Etnis Tionghoa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018 memiliki kecenderungan perilaku pemilih psikologis dan rasional. Secara psikologis perilaku memilih pemuda Etnis Tionghoa cenderung dipengaruhi oleh indikator pengaruh kampanye dan ketokohan calon, sedangkan secara rasional cenderung dipengaruhi oleh indikator prestasi kepemimpinan calon pada periode sebelumnya.

Kata kunci: perilaku memilih, pemuda, etnis tionghoa

ABSTRACT

The emergence of demographic issues makes research related to the behavior of beginner voters very interesting to do, some studies have managed to find a tendency for beginner voter behavior, and several other studies have also succeeded in finding trends in voting behavior against ethnic identity. Therefore researchers are interested in discussing and describing the tendency of voter behavior in certain age categories which are also clashed with ethnicity factors. Chinese ethnicity is an ethnic minority that has a long history on the Indonesian political stage, and the city of Palembang is one of the cities in Indonesia that has left a lot of evidence of the history of Chinese civilization, even from the time of the Srivijaya Empire. This study aims to determine the behavioral trends of choosing Chinese Ethnic Youth in the Mayor and Deputy Mayor of Palembang in 2018. The method used in this study is a quantitative method with a survey design. The unit of analysis of this study was ethnic Chinese youth who were members of the Indonesian Chinese Youth Association (IPTI) in Palembang City. This study uses a voter behavior approach with an analysis of three

models, namely sociological, psychological and rational choices. Based on the results of the research in the field it can be concluded that the behavior of choosing Chinese Ethnic Youth in the Mayor and Deputy Mayor of Palembang in 2018 has a tendency towards psychological and rational voting behavior. Psychologically, the behavior of choosing ethnic Chinese youth tends to be influenced by indicators of the influence of campaigns and figures of candidates, while rationally tends to be influenced by the leadership performance indicators of candidates in the previous period.

Keywords: *voting behavior, youth, chinese ethnicity*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2018 by the author(s).

Received: October 22 2018

Revised: November 4 2018

Accepted: November 6 2018

PENDAHULUAN

Samuel P. Huntington berpendapat bahwa syarat utama yang paling penting dalam demokrasi adalah adanya pemilihan yang kompetitif diantara para calon pemimpin oleh rakyat yang akan dipimpinya. Di Indonesia, tepatnya di era Reformasi, demokrasi berkembang menjadi komponen penting dalam sistem politik di Indonesia. Salah satu bentuk perwujudannya adalah rakyat diikutsertakan secara langsung untuk memilih perwakilannya di legislatif dari pusat hingga ke daerah, presiden dan wakil presidennya hingga pemilihan langsung terhadap kepala daerahnya masing-masing, sehingga secara langsung pula pemahaman dan kedewasaan rakyat dalam demokrasi diuji. Selain itu, pemilihan langsung pada akhirnya menyentuh hak politik semua warga negara, bahkan hak politik kaum minoritas sekalipun.

Indonesia sebagai negara multikultural yang memiliki penduduk beragam baik dalam hal agama, ras, bahasa, dan golongan. Selain dikenal sebagai negara multikultural, Indonesia juga terkenal sebagai negara yang merupakan perpaduan banyak etnis, sebagian besar merupakan etnis asli (mayoritas), dan selebihnya merupakan etnis pendatang (minoritas), seperti Etnis Tionghoa, Etnis Arab, dan Etnis India. Menurut Yusufirlana dan Warsono (2014) dari beberapa etnis pendatang tersebut, Etnis Tionghoa merupakan etnis yang paling banyak membaaur dan terlibat dalam struktur masyarakat Indonesia. Menurut Suryadinata (dalam Mahfud, 2013), jumlah penduduk Indonesia Tionghoa naik sekitar 1,45% sampai 2,04% setiap tahunnya. Artinya pertumbuhan penduduk Tionghoa di Indonesia cukup pesat, sehingga ini akan berbanding lurus dengan berkembangnya kepentingan penduduk Tionghoa dalam aktivitasnya sebagai warga negara.

Apabila ditinjau dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, ada beberapa tokoh Tionghoa yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, terutama pada masa pemerintahan Soekarno (Guneman, 2017; Mahfud, 2013). Akan tetapi pada pemerintahan selanjutnya yakni pemerintahan Orde Baru banyak muncul kebijakan yang membatasi ruang gerak masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dari beberapa fase sejarah Indonesia, zaman Soeharto atau yang lebih dikenal dengan Orde Baru seakan menabukan keberadaan Etnis Tionghoa di Indonesia. Melalui Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, pemerintah membatasi bahkan menghilangkan apapun yang berhubungan

dengan Tionghoa (Sopiah, 2017).

Perilaku politik Etnis Tionghoa ke dalam 6 corak, yaitu: tradisional, nasionalis, integrasionis, asimilasionis, terasimiliasi, dan Cukong (Coppel, 1994). Corak tradisional merupakan corak di mana Etnis Tionghoa mendapat perlakuan diskriminatif dari rezim penguasa seperti pada masa kekuasaan Kolonial Jepang. Corak nasionalis di mana mereka berorientasi kuat pada nasionalisme Tiongkok sebagai bukti cinta terhadap tanah leluhur mereka. Adapun corak integrasionis dapat dilihat pada keinginan mereka bergabung dengan Indonesia secara utuh tanpa menghilangkan identitas sebagai orang Tionghoa. Sedangkan corak asimilasionis merupakan perilaku politik yang ditandai dengan upaya meleburkan dan menyatukan diri dengan identitas keindonesiaan secara total. Sementara corak terasimiliasi ditandai oleh paksaan rezim untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia tanpa syarat kepada Etnis Tionghoa. Terakhir corak cukong yang pada umumnya berkembang pada masa Orde Baru, di mana terjadi penetrasi elit bisnis Etnis Tionghoa terhadap kekuasaan melalui penguasaan ekonomi.

Diakui atau tidak, keberadaan Etnis Tionghoa di Indonesia masih dianggap sebagai orang asing yang belum dapat sepenuhnya melakukan pembauran dengan kelompok mayoritas Pribumi di Indonesia. Meskipun demikian, beberapa perorangan Tionghoa tertentu mencoba untuk mengidentifikasi diri mereka dengan para nasionalis Indonesia (Suryadinata, 1981). Masalah rasial masih menjadi wacana hangat sampai saat ini pasca meletusnya peristiwa Mei 1998 di mana terjadi kerusuhan di banyak kota di Indonesia. Peristiwa ini bisa dikatakan sebagai salah satu malapetaka terbesar di Indonesia, terutama bagi kalangan yang berasal dari etnis Tionghoa. Peristiwa kelam yang sulit untuk dilupakan bagi segenap insan Tionghoa di Indonesia (Pattiradjawane, 2000; Ranto, 2014).

Kebebasan etnis Tionghoa mulai menemui titik terang sejak lengsernya Orde Baru. Titik terang semakin terlihat saat keluarnya Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi pada masa Presiden B.J. Habibie, dan semakin sempurna saat Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6/ 2000 yang berisi pencabutan Inpres No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Bergulirnya era Reformasi, menjadi masa kemerdekaan tersendiri bagi etnis Tionghoa karena mereka lebih bebas berekspresi (Dawis, 2013; Sopiah, 2017). Jiwa nasionalisme dari etnis Tionghoa kemudian terasa dengan berbagai bentuk, misalnya mulai lahir kesadaran di kalangan orang-orang Tionghoa Indonesia untuk meramaikan kancah politik nasional maupun daerah.

Era Reformasi merupakan awal munculnya kembali Etnis Tionghoa sebagai salah satu komponen politik di Indonesia. Tidak hanya sebagai partisipan atau pemilih, keikutsertaan calon-calon legislatif atau bahkan calon eksekutif dari kalangan Tionghoa turut memberi warna pada panggung politik nasional. Pada Pemilu 1999, tercatat 150 lebih calon anggota legislatif dari Etnis Tionghoa, pemilu 2004 jumlahnya meningkat menjadi 200 lebih. Adapun beberapa calon legislatif keturunan Tionghoa antara lain Alvin Lie (Partai Amanat Nasional), Alex Indra Lukman (PDI Perjuangan), Rudianto Tjen (PDI Perjuangan) dan Charles Honoris (PDI Perjuangan). Bahkan dalam perkembangannya banyak tokoh-tokoh politik

etnis Tionghoa yang memiliki posisi-posisi penting di Partai politik dan pemerintahan, sebagai menteri, bahkan kepala daerah.

Dewasa ini, Etnis Tionghoa yang berada di Kota Palembang semakin menunjukkan minatnya terjun dalam panggung politik. Beberapa nama dari etnis Tionghoa juga merupakan tokoh penting dalam percaturan politik di Kota Palembang. Sebut saja Toni Huang yang merupakan salah satu bakal calon Wakil Walikota Palembang tahun 2008-2013, akan tetapi gagal sampai kepada tahap pencalonan, padahal jumlah pemilih suara yang berasal dari Etnis Tionghoa sendiri begitu potensial dan signifikan. Etnis Tionghoa di Palembang jumlahnya diperkirakan sekitar 300 ribu orang, angka yang cukup signifikan untuk menjadi lumbung suara dalam pemilihan Walikota yang akan berlangsung (Ary, 2018).

Pasca kemunculan nama tokoh dari Etnis Tionghoa di beberapa tahun lalu sebagai bakal calon walikota dan jumlah Etnis Tionghoa yang diperkirakan cukup tersebar di wilayah Kota Palembang, maka persepsi dan kecenderungan perilaku memilih Etnis Tionghoa dalam merespons Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018 menarik untuk diketahui. Berdasarkan data KPU Kota Palembang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah yang terindikasi sebagai wilayah penyebaran Etnis Tionghoa yakni, Kelurahan 7 Ulu, 9/10 Ulu, Bukit Lama, 10 Iilir, 15 Iilir, Kepandean Baru, dan Kelurahan 16 Iilir berjumlah 62.037 orang, dan dari data tersebut didapatkan bahwa DPT dengan kategori pemuda yang berusia 17-30 tahun di daerah penyebaran Etnis Tionghoa jumlahnya cukup signifikan, yakni 23.187 orang.

Jumlah Pemuda Etnis Tionghoa yang cukup signifikan bila dilihat dari jumlah etnisnya secara keseluruhan di Kota Palembang tentu menjadi objek yang sangat menarik untuk diteliti. Apalagi seiring dengan berhembusnya isu demografi tentang peningkatan jumlah angka pemilih yang berasal dari generasi milineal (Jurnaliston, 2018), maka tidak menutup kemungkinan Etnis Tionghoa juga mengalami penambahan pemilih muda yang signifikan, dan perilaku memilih mereka tentu tidak hanya mengundang analisis yang menarik perihal umur, tetapi juga menyentuh faktor sosiologis lain yakni perihal identitas etnis.

Munculnya isu demografi membuat penelitian terkait perilaku memilih pemula sangat menarik untuk dilakukan, misalnya studi tentang Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015 menyimpulkan bahwa secara sosiologis perilaku pemilih pemula dipengaruhi latar belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya, sedangkan dalam pendekatan psikologis pemilih pemula memilih berdasarkan figur kandidat yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat (Rachmat & Esther, 2016). Kecenderungan perilaku pemilih menunjukkan bahwa kecenderungan model perilaku pemilih pemula yaitu tingginya preferensi politik keluarga pada perilaku pemilih pemula (Hasriani, Madani, & Handam, 2015).

Penelitian lainnya menggambarkan kecenderungan perilaku pemilih Etnis Tionghoa semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi politik Etnis Tionghoa dalam pemberian suara (voting) pada pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2006 dengan persentase sebesar 72,90% dan

meningkat sebesar 11% pada pemilu pada tahun 2012 (Sari, Alamsyah, & Zulfan, 2017). Faktor pendorong partisipasi politik Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh tahun 2006 adalah faktor kesadaran politik dan faktor lingkungan sedangkan di tahun 2012 dipengaruhi faktor kesadaran politik dan rasa ingin tahu.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut membuat peneliti tertarik membahas dan menguraikan proses terbentuknya perilaku pemilih dalam kategori umur tertentu yang juga dibenturkan dengan faktor etnisitas, maka penelitian ini memilih Pemuda Etnis Tionghoa sebagai objek penelitian, dan Kota Palembang sebagai lokasi penelitian atas dasar sejarah yang menunjukkan begitu kentalnya keberadaan Etnis Tionghoa di Kota tersebut. Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan spesifik, maka penelitian ini akan dilakukan terhadap organisasi kepemudaan Etnis Tionghoa yang ada di Kota Palembang, yakni Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Kota Palembang.

IPTI merupakan organisasi kepemudaan Tionghoa yang bergerak dibidang sosial. Di Palembang, IPTI didirikan pada tahun 2017 dan telah melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti: bakti sosial di panti asuhan dan kegiatan donor darah di rumah sakit yang ada di Kota Palembang. IPTI merupakan organisasi kepemudaan yang tidak berkecimpung di dunia politik, akan tetapi tidak membatasi anggota-anggotanya untuk terjun ke dunia politik secara pribadi. Salah satu tokoh IPTI Kota Palembang yakni Hardi, merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dari fraksi Partai Nasdem, dan ada juga beberapa anggota lain yang terlibat dalam partai politik.

Berdasarkan hasil observasi awal, kecenderungan anggota IPTI menitikberatkan faktor *track record* atau pengalaman memimpin dalam memilih kandidat pada pemilihan calon walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2018. Aksi nyata yang pernah dilakukan oleh kandidat, juga bahkan riwayat kandidat yang bersih dari kasus apapun juga menjadi pertimbangan. Satu dari beberapa anggota IPTI yang diajak berdiskusi juga mengungkapkan bahwa, kandidat yang dipilihnya pernah berhubungannya kerja langsung dengannya, dan dia menilai secara karakter kandidat tersebut bagus dan responsif. Selain itu *track record* kandidat yang juga pernah memimpin sebelumnya itu sangat terasa kinerjanya, seperti perbaikan jalan dan tata ruang lainnya.

Faktor-faktor yang ditemukan pada observasi awal adalah adanya kecenderungan perilaku pemilih psikologis yang tepatnya dipengaruhi oleh ketokohan kandidat, atau bisa juga sebagai gambaran kecenderungan perilaku pemilih rasional yang berhubungan dengan keuntungan yang dirasakan oleh pemilih seperti perbaikan jalan dan tata ruang. Kecenderungan perilaku pemilih tersebut tentu dapat semakin bervariasi bila objek yang ditelitipun semakin banyak, dan dari berbagai faktor yang ditemukan dapat diberikan gambaran kecenderungan faktor yang dominan dalam memberikan pengaruh pada perilaku memilih objek yang diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka artikel ini akan membahas tentang perilaku memilih pemuda etnis Tionghoa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018 dengan studi kasus Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Kota Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

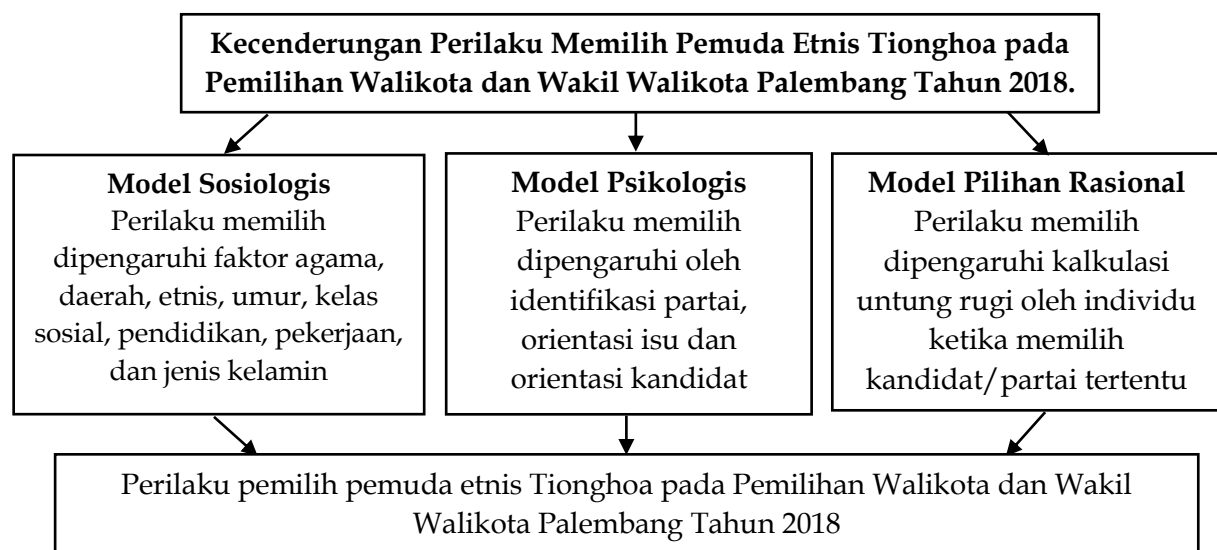
Konsep Perilaku Memilih

Perilaku memilih merupakan suatu bentuk dari perilaku politik, yang secara umum merupakan sasaran kajian pendekatan *behavioral* (Mariana, Paskarina, & Yuningsih, 2001). Pendekatan ini merupakan respon terhadap teori yang spekulatif dalam mengurai, menyimpulkan, dan memberikan penilaian sesuai dengan norma-norma atau tata aturan, serta standar kekuasaan maupun etnosentrisme, formalisme dan deskripsi barat yang menjadi ciri khas pendekatan tradisional kontemporer. Analisis perilaku memilih Pemuda Etnis Tionghoa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 pada penelitian ini akan diidentifikasi dengan menggunakan tiga model, yakni Model Sosiologis, Psikologis dan Pilihan Rasional (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012).

Model Sosiologis yang dimaksud dalam kerangka berpikir ini adalah pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku memilih yang dipengaruhi oleh sesuatu yang melekat dalam diri individu berupa identitas sosial tertentu, seperti: agama, daerah, suku, umur, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan jenis kelamin. Secara sosiologis apabila seseorang berada pada organisasi-organisasi atau jaringan primordial yang mengutamakan identitas-identitas sosial, maka akan semakin kuat atau dominan pengaruh sosiologisnya.

Model Psikologis merupakan pendekatan perilaku memilih yang dilakukan terhadap penilaian individu mengenai identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu. Identifikasi partai berhubungan dengan *partisanship* (keberpihakan) seorang individu terhadap kandidat yang dipilihnya, yang disebabkan melalui proses mengidentikkan dirinya dengan partai atau kandidat tertentu. Sementara orientasi isu dan orientasi kandidat merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku memilih. Hal ini bisa disebabkan oleh pengaruh masyarakat secara langsung, situasi politik dan ekonomi, atau media massa.

Gambar 1. Alur Pemikiran Penelitian Perilaku Memilih IPTI pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018



Sumber: Peneliti (2018)

Model Pilihan Rasional merupakan pendekatan yang mengidentifikasi kalkulasi untung rugi oleh seorang individu ketika memilih, hal ini berkaitan dengan persepsi individu terhadap berpengaruh atau tidaknya suara yang dia berikan pada pemilihan, atau keuntungan yang diperoleh ketika memilih kandidat tertentu. Melalui model ini dapat dipahami bahwa ikatan kesetiaan pemilih disebabkan oleh dorongan kepentingan tertentu, sehingga kemampuan partai politik atau kandidat dalam memenuhi harapan pemilih merupakan faktor yang menyebabkan seorang pemilih tetap mendukung atau justru menarik diri.

Adapun desain/kerangka berpikir yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Pemuda

Pemuda merupakan seseorang yang berada diantara usia anak-anak dan dewasa, dengan karakteristik yang dinamis, optimis bahkan bergejolak disebabkan pengendalian emosional yang belum matang (Masdiana, Erlangga, Susilo, & Suratman, 2008). Sementara itu, menurut Undang-undang no. 40 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun sehingga berdasarkan beberapa konsep tentang pemuda yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menetapkan konsep pemuda yang dimaksud pada penelitian adalah Etnis Tionghoa yang memenuhi batas minimal Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sesuai dengan aturan undang-undang yakni berusia 17 sampai 30 tahun, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Etnis Tionghoa

Identitas etnis Tionghoa atau etnis yang lain pada umumnya akan lebih mudah dikenali dari ciri fisik mereka atau nama yang mereka kenakan. Selain itu juga bisa dikenali dari bahasa dan adat serta budaya yang mereka gunakan sehari-hari. Ciri fisik yang melekat pada orang Tionghoa yaitu bermata sipit, kulit berwarna kuning langsung atau juga putih. Soe Hok Gie, Kho Kie Kwee, Lim Kok Liong merupakan contoh dari nama-nama yang biasa dipakai oleh kelompok etnis Tionghoa (Rahoyo, 2010). Etnis Tionghoa terbagi menjadi dua kelompok, yakni Tionghoa Peranakan dan Tionghoa *Totok*. Tionghoa Peranakan adalah kelompok etnis Tionghoa yang telah lama bermukim di Indonesia dan membaur, berbahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Sementara Tionghoa *Totok* merupakan Etnis Tionghoa pendatang yang umumnya baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa Tonghoa (Suryadinata, 2002). Seiring terhentinya imigrasi, jumlah Tionghoa *Totok* semakin menurun dan generasinya mengalami peranakanisasi. Oleh sebab itu generasi muda Tionghoa di Indonesia secara keseluruhan merupakan Tionghoa peranakan.

Sementara itu dalam hal kepemimpinan, nilai-nilai budaya Tionghoa cenderung banyak menerapkan ajaran Konfusianisme. Menurut Redding (1993) kepemimpinan Tionghoa cenderung bersifat paternalisme, personalisme dan rasa ketidakamanan. Nilai *Paternalisme* membuat seorang pemimpin akan bersikap peduli dan baik pada yang dipimpinnya agar menciptakan kepatuhan dan kesetiaan. *Paternalisme* mengakibatkan pemimpin untuk mengadopsi struktur

kekeluargaan dalam kepemimpinannya. walaupun di dalam lingkungan bawahan tidak melibatkan anak-anak dan saudara-saudara. Nilai personalisme dalam kepemimpinan lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan pribadi yang berlandaskan pada *guanxi* yang erat karena dominasi etnis yang sama. Sementara nilai rasa ketidakamanan mempunyai makna pada jalannya roda organisasi yang fleksibel. Karena banyak didominasi oleh orang-orang kepercayaan. Orang-orang kepercayaan yang dimaksud adalah orang-orang yang dipilih secara subyektif dari atasan tanpa membandingkan kinerja aktual berdasarkan kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan survei (*Survey Design*). Menurut Babbie (dalam Creswell, 2016) tujuan penelitian dengan rancangan survei adalah untuk membuat kesimpulan atau dugaan sementara tentang beberapa kecenderungan, seperti: karakteristik, perilaku, dan sikap dari populasi. Adapun objek pada penelitian ini adalah seluruh anggota Ikatan Pemuda Etnis Tionghoa (IPTI) Kota Palembang yang berusia 17-30 tahun. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, survei dan wawancara, kemudian data diolah dan dianalisis untuk menemukan kecenderungan perilaku memilih pemuda Etnis Tionghoa pada pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2018.

HASIL PENELITIAN

Persepsi Pemuda Etnis Tionghoa terhadap Indikator Perilaku Pemilih Sosiologis

Berdasarkan olah data statistik yang dilakukan terhadap jawaban responden, maka dapat diketahui bahwa 45,4% responden tidak setuju bila pertimbangan memilih calon walikota dan wakil walikota didasarkan pada pertimbangan memilih calon yang masih muda, persentase ini jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan persentase responden yang setuju, yakni hanya sebanyak 29,5%. Selanjutnya 79,5% responden juga tidak setuju bila pertimbangan memilih calon walikota dan wakil walikota didasarkan pada pertimbangan kesamaan jenis kelamin dengan calon, sementara 15,9% responden yang lain menyatakan setuju dengan pertimbangan tersebut. Sebagian besar responden (95,5%) menyatakan tidak setuju bila kesamaan etnis dijadikan pertimbangan dalam memilih calon walikota dan wakil walikota. Sebanyak 93,2% responden juga tidak sepakat ketika kesamaan agama menjadi dasar pertimbangan dalam memilih calon walikota dan wakil walikota. Sementara itu 31,8% responden menyatakan setuju memilih calon walikota dan wakil walikota atas dasar pertimbangan tingkat pendidikan calon, akan tetapi jumlah ini masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan persentase responden yang tidak setuju (40,9%) bila pertimbangan tersebut dijadikan alasan dalam memilih calon walikota dan wakil walikota. Mayoritas responden (77,1%) juga menyatakan tidak setuju bila kesamaan kelas sosial dijadikan sebagai pertimbangan ketika memilih calon walikota dan wakil walikota. Sejalan dengan hal tersebut juga diketahui bahwa 95,5 % responden juga tidak sepakat bila pertimbangan memilih calon walikota dan wakil walikota didasarkan atas dasar kesamaan tempat tinggal dengan calon.

Setelah dilakukan skoring dan uji normalitas terhadap jawaban responden maka selanjutnya didapatkan nilai mean yang digunakan sebagai *cut of poin*

indikator perilaku pemilih sosiologis, hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Skor Rata-Rata Terkait Indikator Perilaku Pemilih Sosiologis

Variabel	MinMax	Mean	SD
Perilaku Pemilih Sosiologis	1,00- 3,86	2,09	0,39

Hasil analisis didapatkan bahwa mean dari indikator perilaku pemilih sosiologis adalah 2,09 dengan rentang skor 1,00- 3,86. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk mengkategorikan indikator perilaku pemilih sosiologis, yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Indikator Perilaku Pemilih Sosiologis

Variabel	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Perilaku Pemilih Sosiologis	Setuju	12	27,27
	Tidak Setuju	32	72,73
Total		44	100

Pada Tabel 2 diketahui bahwa mayoritas responden yakni 72,73% menyatakan tidak setuju bila indikator perilaku pemilih sosiologis dijadikan sebagai dasar pertimbangan ketika memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018.

Persepsi Pemuda Etnis Tionghoa terhadap Indikator Perilaku Pemilih Psikologis

Berdasarkan distribusi jawaban responden terkait indikator perilaku pemilih psikologis dapat diketahui bahwa 88,6% responden menyatakan ketidaksetujuannya bila kesamaan identitas partai dijadikan sebagai pertimbangan ketika memilih calon walikota dan wakil walikota. Sebanyak 45,4% responden juga menyatakan tidak setuju bila isu yang berkembang di media massa mempengaruhi pilihan responden ketika memilih calon walikota dan wakil walikota, persentase ini lebih besar bila dibandingkan dengan persentase responden yang setuju, yakni sebanyak 25%. Sementara itu 40,9% responden setuju bahwa kampanye calon berpengaruh terhadap pertimbangan responden ketika memilih calon walikota dan wakil walikota, persentase tersebut hanya 9% lebih banyak bila dibandingkan dengan responden yang tidak setuju. Sebanyak 47,7% responden menyatakan setuju bahwa ketokohan calon merupakan dasar pertimbangan yang dapat digunakan ketika memilih calon walikota dan wakil walikota, sedangkan 31,8% responden lainnya menyatakan ketidaksetujuannya terkait pertimbangan ketokohan tersebut. Kemudian dari tabel diatas juga diketahui bahwa mayoritas responden (88,7%) menyatakan tidak setuju bila ikatan keluarga dijadikan pertimbangan ketika memilih calon walikota dan wakil walikota.

Setelah dilakukan skoring dan uji normalitas terhadap jawaban responden maka selanjutnya didapatkan nilai mean yang digunakan sebagai *cut of poin* indikator perilaku pemilih psikologis, hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Skor rata-rata terkait Indikator Perilaku Pemilih Psikologis

Variabel	Min-Max	Mean	SD
Perilaku Pemilih Psikologis	1,33- 3,67	2,60	0,33

Hasil analisis didapatkan bahwa mean dari indikator perilaku pemilih psikologis adalah 2,60 dengan rentang skor 1,33- 3,67. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk mengkategorikan indikator perilaku pemilih psikologis, yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Indikator Perilaku Pemilih Psikologis

Variabel	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Perilaku Pemilih Psikologis	Setuju	26	59,09
	Tidak Setuju	18	40,91
Total		44	100

Pada Tabel 4 diketahui bahwa sebagian besar responden yakni 59,09% menyatakan setuju bila indikator perilaku pemilih psikologis dijadikan sebagai dasar pertimbangan ketika memilih calon walikota dan wakil walikota, jumlah persentase tersebut lebih besar dan memiliki selisih sebanyak 18,18% ketika dibandingkan dengan jumlah persentase responden yang tidak setuju bila indikator perilaku pemilih psikologis dijadikan sebagai dasar pertimbangan ketika memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018.

Persepsi Pemuda Etnis Tionghoa terhadap Indikator Perilaku Pemilih Rasional

Berdasarkan distribusi jawaban responden terkait indikator perilaku pemilih rasional dapat diketahui bahwa sebanyak 84,1% responden menyatakan setuju bila *track record* calon dijadikan sebagai dasar pertimbangan ketika memilih calon walikota dan wakil walikota. Sebanyak 61,3% responden setuju bila prestasi kepemimpinan calon pada periode sebelumnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan ketika memilih calon walikota dan wakil walikota, persentase tersebut jauh lebih besar bila dibandingkan dengan persentase responden yang tidak setuju, yakni hanya sebanyak 11,4%. Selanjutnya juga diketahui bahwa 50% responden menyatakan setuju bila visi dan misi atau program kampanye yang menguntungkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan ketika memilih calon walikota dan wakil walikota, persentase tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan responden yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 31,9%.

Setelah dilakukan skoring dan uji normalitas terhadap jawaban responden maka selanjutnya didapatkan nilai mean yang digunakan sebagai *cut of poin* indikator perilaku pemilih rasional, hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Skor rata-rata terkait Indikator Perilaku Pemilih Rasional

Variabel	Min-Max	Mean	SD
Perilaku Pemilih Rasional	1,67- 5,00	3,68	0,68

Hasil analisis didapatkan bahwa mean dari indikator perilaku pemilih

rasional adalah 3,68 dengan rentang skor 1,67- 5,00. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk mengkategorikan indikator perilaku pemilih rasional, yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Indikator Perilaku Pemilih Rasional

Variabel	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Faktor Pilihan Rasional	Setuju	40	90,91
	Tidak Setuju	4	9,09
Total		44	100

Pada Tabel 6 diketahui bahwa mayoritas responden yakni 90,91% menyatakan setuju bila indikator perilaku pemilih rasional merupakan alasan yang tepat untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan ketika memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018.

Analisis Kecenderungan Perilaku Memilih Pemuda Etnis Tionghoa (Studi Kasus pada IPTI Kota Palembang)

Berdasarkan analisis masing-masing indikator yang dianggap berpengaruh terhadap perilaku memilih pemuda Etnis Tionghoa, didapatkan bahwa indikator perilaku pemilih rasional sebagai indikator yang paling dominan, yakni pada angka 90,91%. Persentase ini tentu jauh lebih besar bila dibandingkan angka kesetujuan responden terhadap indikator perilaku pemilih sosiologis dan psikologis yang masing-masing hanya sebesar 27,27% dan 59,09%. Dominasi pengaruh indikator perilaku pemilih rasional sebenarnya tergambar sangat jelas dari distribusi jawaban responden atas tiga pernyataan yang digunakan, yakni kesetujuan terhadap pertimbangan *track record* calon, prestasi kepemimpinan calon pada periode sebelumnya, dan visi, misi serta program unggulan calon yang menguntungkan responden. Artinya mayoritas pemuda Tionghoa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Tionghoa (IPTI) Kota Palembang merupakan pemilih rasional dalam menentukan pilihannya terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018.

Terkait perilaku memilih yang didasarkan pada indikator-indikator pilihan rasional, semua indikator memperoleh angka distribusi frekuensi kesetujuan yang sangat signifikan, indikator memilih atas dasar *track record* calon mencapai angka kesetujuan sebesar 84,1%, indikator prestasi kepemimpinan calon sebesar 61,3%, dan indikator memilih atas dasar visi, misi, dan program kerja calon yang menguntungkan sebesar 50%. Angka ini jauh diatas angka ketidaksetujuannya, karna sebagian besar responden cenderung memberikan tanggapan ragu-ragu daripada tidak setuju. Hal ini sebenarnya memperlihatkan kecenderungan yang sangat signifikan terkait perilaku memilih responden yang rasional ketika memilih calon walikota dan wakil walikota. Sementara ketika dilakukan uji statistik perihal indikator rasional yang paling berpengaruh terhadap perilaku memilih responden, maka didapatkan bahwa indikator pengaruh prestasi kepemimpinan calon pada periode sebelumnya sebagai indikator yang paling berpengaruh, dengan *p-value* yang lebih kecil dari taraf nyata ($\alpha = 0.05$), yakni berada pada angka 0,07.

Bila ditarik analisis kecenderungan, maka akan diperoleh bahwa tidak hanya indikator-indikator rasional saja yang sebenarnya cenderung menjadi dasar pertimbangan responden dalam menentukan calon walikota dan wakil walikota yang ia pilih, akan tetapi indikator psikologis juga cenderung mempengaruhi perilaku memilih responden. Bila merujuk pada tabel 4, maka akan terlihat dengan jelas bahwa angka distribusi frekuensi kesetujuan responden terkait indikator-indikator psikologis mencapai angka 59,09%. Bila ingin kita lihat angka distribusi frekuensi masing-masing indikator psikologis, maka kita akan menemukan bahwa pengaruh kampanye dan ketokohan calon merupakan dua indikator psikologis yang paling mencolok sebagai dasar pertimbangan responden ketika memilih calon walikota dan wakil walikota, masing-masing mencapai pada angka 40,9% dan 47,7%. Secara statistik, telah diuji bahwa indikator pengaruh kampanye dan ketokohan calon merupakan dua indikator psikologis yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih responden, dengan *p-value* yang lebih kecil dari taraf nyata ($\alpha= 0.05$).

Merujuk pada beberapa literatur atau penelitian terdahulu terkait perilaku memilih, baik perilaku pemilih pemula maupun perilaku memilih Etnis Tionghoa secara keseluruhan, maka akan diperoleh beberapa persamaan dan beberapa perbedaan sebagai dampak dibenturkannya kategori usia dan etnis pada subjek penelitian ini (pemuda Etnis Tionghoa). Menurut Hasriani *et al* (2015) misalnya, penelitiannya terkait perilaku pemilih pemula di Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa menunjukkan sebuah kecenderungan model perilaku pemilih pemula dengan preferensi politik keluarga yang tinggi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ranto (2014) memberikan gambaran kecenderungan perilaku pemilih Etnis Tionghoa pada Pileg Kabupaten Bangka bahwa Etnis Tionghoa yang cenderung dipengaruhi oleh ikatan-ikatan primordial seperti aspek agama, etnisitas dan kedaerahan. Apabila hasil dari kedua penelitian tersebut dikomparasikan dengan hasil penelitian ini, maka ditemukan hasil yang sangat berbeda.

Preferensi politik keluarga misalnya, pada penelitian ini justru ditemukan hanya 4,5% responden yang setuju bila ikatan keluarga dijadikan dasar pertimbangan ketika memilih calon walikota dan wakil walikota. Sementara itu terkait indikator-indikator sosiologis, terlihat rendahnya angka kesetujuan responden terhadap indikator-indikator sosiologis yang ditanyakan, bahkan diantara indikator-indikator sosiologis yang ditanyakan justru indikator usia calon yang masih muda dan tingkat pendidikan calon yang cenderung memperoleh tanggapan kesetujuan responden lebih banyak bila dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya.

Berbeda dengan dua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh H Basuki Rachmat dan Esther (2016) tentang Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara sosiologis perilaku pemilih pemula dipengaruhi latar belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya. Sedangkan dalam pendekatan psikologis pemilih pemula memilih berdasarkan figur kandidat yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat. Dalam

pendekatan rasional menunjukkan pemilih pemula tidak memandang uang atau barang sebagai acuan dalam memilih namun berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan dari masing-masing kandidat. Sementara itu, terkait perilaku memilih Etnis Tionghoa, penelitian juga pernah dilakukan oleh Gazali (2017), penelitiannya tentang perilaku pemilih Etnis Tionghoa di Pare-Pare pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2013 menunjukkan hasil bahwa, kecenderungan perilaku pemilih Etnis Tionghoa pada pemilihan walikota sebagai pemilih rasional.

Bila dibandingkan dengan penelitian ini, penelitian H. Basuki Rachmat dan Ester memiliki kesamaan secara psikologis, bahwa figur atau ketokohan calon merupakan indikator yang paling diperhatikan oleh responden dibandingkan indikator psikologis lainnya. Distribusi angka kesetujuan responden terhadap indikator memilih berdasarkan ketokohan calon mencapai 47,7%, dan angka ini juga jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanggapan responden terhadap indikator psikologis lainnya. Sementara itu hasil penelitian H. Basuki Rachmat dan Ester yang menunjukkan secara rasional pemilih pemula memilih berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan juga cenderung sama dengan hasil penelitian ini, begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan Gazali yang mendapatkan hasil bahwa perilaku memilih Etnis Tionghoa di Pare-Pare pada pemilihan walikota dan wakil walikota yang cenderung rasional.

Pada penelitian ini, perilaku memilih pemuda Etnis Tionghoa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018 juga memiliki kecenderungan yang rasional. Akan tetapi bila dianalisa secara spesifik distribusi frekuensi tanggapan responden terkait indikator visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan calon yakni 50% jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan indikator rasional lainnya. Pada penelitian ini justru indikator *track record* dan prestasi kepemimpinan calon pada periode sebelumnya memperoleh persentase tanggapan yang jauh lebih besar, yakni masing-masing 84,1% dan 61,1%. Artinya, indikator memilih yang didasarkan pada visi, misi, dan program kerja calon memang mendapatkan tanggapan yang positif dari responden, akan tetapi ada indikator lain yang angka kesetujuannya justru mendapatkan persentase yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan indikator tersebut.

SIMPULAN

Secara keseluruhan didapatkan beberapa poin kesimpulan terkait dengan perilaku memilih pemuda Etnis Tionghoa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan pada Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Kota Palembang ini menunjukkan bahwa, responden memiliki kecenderungan perilaku pemilih psikologis dan rasional. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas pada angka distribusi frekuensi indikator-indikator pemilih psikologis dan rasional, angka kesetujuan responden terhadap kedua indikator perilaku pemilih tersebut masing-masing berada pada angka 59,09% dan 90,91%. Secara psikologis responden memperlihatkan kecenderungan bahwa indikator memilih berdasarkan pengaruh kampanye dan ketokohan calon merupakan dasar pertimbangan yang digunakan ketika memilih calon walikota dan wakil walikota. Sedangkan secara rasional, indikator memilih berdasarkan prestasi

kepemimpinan calon pada periode sebelumnya merupakan indikator yang paling berpengaruh, meskipun secara keseluruhan responden memperlihatkan kecenderungan yang positif bahwa, indikator rasional lainnya yakni memilih berdasarkan *track record* serta visi, misi, dan program kerja calon yang menguntungkan juga merupakan dasar pertimbangan yang dapat digunakan ketika memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada bidang kajian sosiologi politik, yang memberikan gambaran bahwa Etnis Tionghoa atau secara spesifik pemuda Etnis Tionghoa ternyata memperlihatkan kecenderungan perilaku memilih psikologis dan rasional, artinya hal ini tentu berbeda dengan gerakan-gerakan politik Etnis Tionghoa pada masa awal reformasi yang cenderung sosiologis, dan berorientasi pada motif-motif politik yang cenderung berdasarkan kepentingan etnis yang pernah mengalami masa kelam di masa sebelumnya (Orde Baru). Selain itu penelitian ini juga menampik anggapan bahwa Etnis Tionghoa merupakan etnis yang apolitis, karena pada penelitian ini ditemukan bahwa hampir keseluruhan responden yang merupakan pemuda Etnis Tionghoa berpartisipasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota, dengan angka partisipasi yang mencapai 95,5%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi positif pada persepsi masyarakat yang selama ini menganggap Etnis Tionghoa memiliki motif politik yang hanya berorientasi pada kepentingan etnisnya saja.

Adapun rekomendasi untuk penelitian-penelitian berikutnya seputar perilaku memilih pemuda Etnis Tionghoa atau Etnis Tionghoa secara keseluruhan, dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian campuran (*mix method*), sehingga dapat menggali motif perilaku memilih secara lebih mendalam tentang kecenderungan perilaku pemilih tertentu. Selain itu, penelitian berikutnya diharapkan dilakukan pada studi kasus yang lebih luas, sehingga menjangkau tanggapan yang lebih kompleks dari jumlah responden yang juga lebih banyak, sehingga hasil penelitian yang didapatkan memiliki dasar empirik yang lebih kuat.

REFERENSI

- Ary. (2018). Pilkada, Etnis Tionghoa Terganggu Psikologisnya. Retrieved June 8, 2018, from <https://news.detik.com/berita/911668/pilkada-etnis-tionghoa-terganggu-psikologisnya>
- Coppel, C. A. (1994). *Tionghoa Indonesia dalam Krisis (Terjemahan Tim penerjemah PSH: Indonesian Chinese in crisis)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Creswell, J. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dawis, A. (2013). *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gazali, A. (2017). *Perilaku Pemilih Etnis Tionghoa di Pare-Pare pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013*. Universitas Hasanudin.
- Guneman. (2017). 5 Pejabat Indonesia Keturunan Tionghoa. Retrieved July 12, 2018, from <http://guneman.co/2017/02/22/5-pejabat-indonesia-keturunan-tionghoa>
- Hasriani, H., Madani, M., & Handam, H. (2015). *Perilaku Pemilih Pemula Dalam*

- Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1).
- Jurnaliston, R. (2018). Suara Generasi Milineal Sangat Potensial dalam Pemilu. Retrieved November 2, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/15570811/suara-generasi-milineal-sangat-potensial-dalam-pemilu>
- Mahfud, C. (2013). *Manifestasi Politik Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mariana, D., Paskarina, C., & Yuningsih, N. Y. (2001). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Masdiana, Erlangga, Susilo, & Suratman. (2008). *Peran Generasi Muda dalam Ketahanan Nasional*. Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Pattiradjawane, R. L. (2000). *Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Etnis Tionghoa di Indonesia, dalam I. Wibowo, Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pustaka Studi Tionghoa.
- Rachmat, B., & Esther, E. (2016). Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widayapraja*, 42(2), 25–35.
- Rahoyo, S. (2010). *Dilema Tionghoa Muslim*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ranto. (2014). *Perilaku Memilih Etnis Tionghoa Studi Kasus Perilaku Memilih Masyarakat Etnis Tionghoa pada Pemilu Legislatif DPR Tahun 2009 di Kabupaten Bangka*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Redding, G. (1993). *The Spirit of Chinese Capitalism* (Vol. 22). Berlin: Walter de Gruyter.
- Sari, O. A., Alamsyah, & Zulfan. (2017). Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006-2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah*, 2(3).
- Sopiah, P. S. (2017). Inpres No 14 Tahun 1967 dan Implikasinya Terhadap Identitas Muslim Tionghoa Cirebon. *Jurnal Tamaddun*, 5(2).
- Suryadinata, L. (1981). *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadinata, L. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Yusfirlana, & Warsono. (2014). Orientasi Politik Politisi Etnis Cina Di Kota Surabaya Pada Pemilu 2004 Dan 2009. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 1(2).